IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SEMARANG SELATAN TAHUN 2011)

Rosihan Widi Nugroho, Nina Widowati, Rihandoyo

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

Abstraksi :

Analyzing the Implementation of Bantuan Operasional Sekolah or School Operational Fund and the Public's Interests in Free Basic Education. The Government of the Republic of Indonesia has recently issued an educational policy, the so-called Bantuan Operasional Sekolah known as BOS or School Operational Fund. This article presents the results of a descriptive study on the implementation of the School Operational Fund in the regency of Gunung Mas, Central Java. The data were obtained through survey on the spot, document analysis, and interviews. The results show that School Operational Fund has increased the interest of the public to send their children to primary schools. This has been indicated by the results of the interviews with a number of school principals and students' parents (guardians) in the area. However, the interest to send children to primary schools was more significant than that to junior high schools.

Keyword : Implementasi ; BOS ; akuntabilitas

Pendidikan menjadi penanggung jawab utama dalam mempercepat peningkatan sumber daya manusia di sebuah negara. Komitmen ini di Negara Indonesia diperkuat dalam penjelasan batang tubuh UUD 1945 pasal 31 bahwa :

1. Setiap warga berhak mendapat pendidikan;
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
3. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Rencana strategis departemen pendidikan dan kebudayaan 2009-2014 memprioritaskan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.

Maka oleh karena itu mulai tahun 2005 pemerintah mngeluarkan kebijakan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah sebagai jawaban untuk memenuhi tanggung jawa pemnuhan pendidikan.

Dalam pelaksanaan yang sudah berjlana 7 tahun ternyata pengelolaan masih jauh dari

harapan. Hasil kajian Indonesian Coruptiion Watch (ICW) tahun 2011 menyampaikan bahwa terjadi korupsi missal dan sistematis dalam penyelenggaraan dana BOS. Terjadinya Korupsi massal dan sistemis dipicu oleh 2 faktor yaitu keterlambatan penyaluran dan buruknya sistem pengawasan atas penggunaan dana BOS. Seiring dengan hal tersebut maka pertanyaan yang diajukan adalah "*bagaimana implementasi peraturan pendidikan nasional no 37 tahun 2012 di sekolah menengah pertama negeri di kota semarang?"*

Adapun tujuan penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui implementasi peraturan menteri pendidikan nasional no 37 tahun 2010 di Kota Semarang dan hubungan antara komunikasi, pelaksana program dan implementasi program BOS tahun 2011.

Sedangkan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Dalam model komunikasi Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa ada pengaruh ineraktif antra komunikasi organisasi dan kegiatan pelaksana serta karaktaeristik badan-badan pelaksana. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan tindakan lanjut memberikan badan-badan tambahan vitalitas dan keahlian, yaitu memperbaiki kemampuan mereka dalam melaksanakan program-program. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menjadi sumber dukungan politik yang mempermudah implementasi kebijakan secara efektif. Sementara itu, sifat kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan tindakan lanjut yang mencakup ketentuan bantuan teknik akan dipengaruhi oleh karakteristik badan pelaksana.

Gambar 1.1

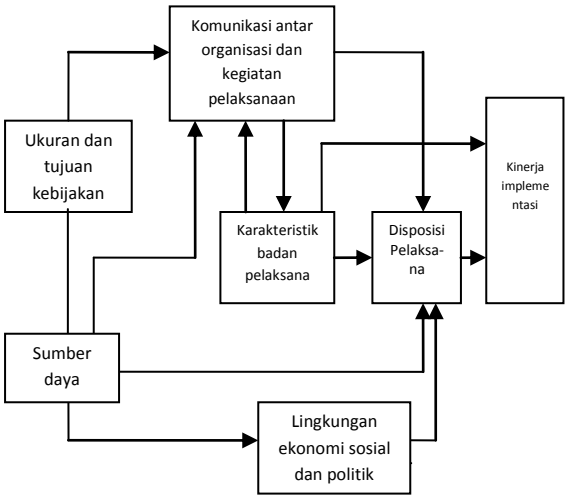

Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter Van Horn

Metode :

Metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif dengna data yang dikumpulkan dari 20 responden yang telah ditetapkan. Alat yang dipakai dalam pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara mendalam dan juga merujuk pada dokumen – dokumen yang relevan.

Hasil :

Dalam implementasi program BOS di SMP Negeri di Semarang, dapat dinilai dari 3 variabel yaitu

1. **Pelaksanaan penggunaan dana BOS.**

Pertama, tingkat ketepatan penggunaan dana BOS.Dalam penyaluran dana BOS ke sekolah, dinas pendidikan kota Semarang mengalamai keterlambatan. Dari 4 SMP N yang menjadi sampel penelitian, penyaluran danaBOS mundur 2 hingga 3 bulan dari waktu seharusnya. Kepala sekolah untuk menutupkekurangan keuangan tersebut dengan melakukan pengetatan dana dan hutang.

Kedua, Penggunaan dana BOS pada 13 komponen pembiayaan berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional (Permendiknas) 37 tahun 2010belum semuanya terpenuhi, yaitu di SMP N 37 yang hanya memenuhi 7 dari 13 komponen menggunakan dana BOS.

Ketiga, walaupun sudah mendapatkan dana BOS beberapa sekolah masih menarik iuran dari siswa, diantaranya untukpembelian seragam pada saat mahasiswa baru, uang tambahan perlajaran (les) dan perpisahan saat kenaikan kelas.

2. **Peningkatan sarana prasarana dan tingkat kelulusan siswa.**

Pertama, dengan adanya program BOS, Sekolah mengalami peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya sarana prasarana yang lengkap, siswa di sekolah prestasinya meningkat baik, baik mendapatkandi kota, provinsi, nasional dan internasional.

Kedua, peningkatan prestasi, dana BOS juga meningkatkan jumlah kelulusan siswa. Pada tahun 2012 seluruh siswa di 4 sekolah mendapatkan tingkat kelulusan 100%.

3. **Komunikasi**

Pertama. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan tingkat ketersediaan sarana informasi dan sosialisasi program BOS yang dilaksanakan masing-masing sekolah berbeda-beda.

Sarana informasi dan sosialisasi program BOS yang digunakan antara lain : komunikasi langsung dengan masyarakat (dalam hal ini orang tua siswa) saat pembagian raport, pelaporan penggunaan dana BOS secara langsung di papan pengumuman sekolah maupun pelaporan kepada perwakilan orang tua siswa.

Berdasarkan panduan BOS, pelaksana hanya diwajibkan melakukan pelaporan dari sekolah ke Satuan kerja, dan tidak mewajibkan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana secara terbuka ke orang tua siswa dan ke masyarakat umum sehingga

kebanyakan sekolah tidak terlalu menganggap perlu menyampaikan laporan kepada orang tua siswa.

4. Kemampuan Pelaksana

Kemampuan pelaksana program BOS diukur melalui :

Penguasaan pelaksana terhadap prosedur pelaksanaan Program BOS

Pelaksana program BOS, dalam hal ini bendahara sekolah harus menguasai kemampuan dasar, meliputi administrasi pembukuan dan pelaporan penggunaan dana BOS. Namun pada kenyataannya, banyak guru yang merangkap sebagai bendahara BOS. Selain itu, latar belakang pendidikan yang tidak sesuai juga menjadi faktor penghambat dalam pembukuan dan pelaporan dana BOS. Hal tersebut menyebabkan guru mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan penggunaan dana BOS.

5. Tingkat pendidikan petugas pelaksana.

Penguasaan pelaksana terhadap prosedur pelaksanaan program BOS erat kaitannya dengan tingkat pendidikan pelaksana program. Pengelolaan dana BOS seharusnya dilakukan oleh bendahara yang benar memahami pembukuan, penyusunan laporan keuangan. Bendahara yang dimaksud dalam hal ini adalah mahasiswa lulusan di fakultas ekonomi di Akademi atau Perguruan Tinggi. Akan tetapi dari ke-4 SMP N yang diteliti, tugas bendahara dirangkap oleh guru sekolah tersebut sehingga sering mengalami kesulitan dalam pembukuan dan pelaporan dana BOS.

Hubungan ketiga variabel terhadap implementasi program BOS

Dari analisa peneliti menyimpulkan bahwa :

Ada hubungan antara kemampuan pelaksanaandan pelaksana program. Ketika pelaksana program mempunyai penguasaan terhadap prosedur pelaksanaan program BOS (kemampuan administrasi pembukuan, pelaporan) dan ditunjang dengan latar belakang kelimuan (pendidikan) yang sesuai spesifikasi akan memudahkan pelaksanaan berjalannya program. Bisa dilihat apabila pelaksana dapat membuat laporan tepat waktu sehingga dana BOS juga akan turun tepat waktu.

Ada hubungan antara kemampuan pelaksana dan komunikasi. Ketersediaan sarana informasi (transparan) dan sosialisasi yang intensif dari unit kerja ke pelaksana program (sekolah) dapat menunjang pelaksanaan program di sekolah. Contoh terkait sosialisasi perubahan sistem pencairan dana BOS tahun 2010 ke 2011 yang tidak seluruh

sekolah memahami menjadi salah satu catatan.

Kesimpulan :

1. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang muncul dalam implementasi permendiknas 37 tahun 2012 adalah bahwa hanya 2 dari 4 sekolah menengah pertama negeri yang memenuhi 13 komponen penggunaan dana BOS.
2. Walaupun mendapatkan dana BOS, SMP Negeri masih menarik iuran diantaranya pembelian seragam, tambahan mata pelajaran dan perpisahan kelas.
3. Adanya program BOS semakin memperbaiki sarana dan prasarana yang berdamak pada peningkatan prestasi sekolah dan tingkat kelulusan
4. Adanya hubungan antaran pelaksana program, komunikasi dan pelaksanaan program BOS tahun 2011 di kota Semarang.

Daftar Pustaka

Streess, Richard M. 1985. Efektifiatas Organisasi (terj). Jakarta : PPm Erlangga.

Sastropoetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Alumni.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Ed). 1989. Metode Penelitian Survey. Jakarta : LP3ES.

Wibawa, Samudra dan Yuyun Purbokusuma dan Agus Pramusinto. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Orafindo

Hadi, Sutrisno. 1995. *Metodologi Research*. Yogyakarta : andi Offset.

Nawawi, Hadadi. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University.

Khairuddin.1997. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta : Liberty.

Islamy, M. Irfan. 1998.*Pembangunan Birokrasi Kebijakan Publik*. Bandung : Peradaban.

Syarbaini, Syahrial M.A. 2002. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi.* Jakarta : Ghalia Indonesia.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses *Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Media Presindo.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.* Jakarta : PT. Elex Media Komputindo (Kelompok Gramedia).

Dunn, William N. 2003.*Pengantar Analisa Administrasi Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2004 : *Metode Penelitian Sosial*. jakarta : Bumi Aksara.

LAN. 2004. AKIP Modul 4 : Jakarta

Nazir, Moh. 2005. *Metode Administrasi*. Bogor : Ghalia Rajawali.

Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

BPS. 2009. Semarang Dalam Angka. Semarang.